

Judul : Jangan ragu sahkan RUU PPRT jadi undang-undang
Tanggal : Selasa, 15 Februari 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Jangan Ragu Sahkan RUU PPRT Jadi Undang-Undang

WAKIL Ketua Komisi Nasional (Komnas) Antikekerasan terhadap Perempuan Mariana Amiruddin meminta para pengambil kebijakan agar jangan ragu mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) menjadi undang-undang.

"Tujuannya untuk melindungi para pembantu rumah tangga kita," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Mariana Amiruddin pada webinar dalam rangka menyambut Hari Pekerja Rumah Tangga Nasio-

nal kemarin.

Mariana mengatakan RUU PPRT terus mengalami pro dan kontra sejak 2004, baik dalam hal perspektif maupun substantif.

Hingga kini, menurut dia, para pengambil kebijakan masih ada yang beranggapan bahwa RUU PPRT dianggap belum mendesak mengingat jumlah kelompoknya kecil. Bahkan, RUU PPRT dianggap dapat mengganggu tatanan sosial dan budaya yang telah ada di masyarakat.

Tahun ini merupakan tahun ke-18 RUU PPRT berada di

DPR RI. Bakal beleid itu masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2022 dan masih menunggu persetujuan sebagai RUU inisiatif DPR. Ada tujuh fraksi di DPR yang mendukung pembahasan RUU PPRT, sedangkan dua fraksi masih menolak.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) yang terus mendesak percepatan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi undang-undang turut menyoroti progres RUU PPRT.

Anggota Majelis Tinggi Partai

NasDem itu berharap pembahasan sejumlah RUU yang bertujuan melindungi hak-hak dasar warga negara seperti RUU PPRT dan RUU Masyarakat Hukum Adat bisa segera diproses dengan menerapkan upaya-upaya percepatan.

Rerie tidak ingin deretan 40 RUU yang terdaftar dalam Prolegnas hanya menjadi etalase yang memajang banyak RUU tanpa mampu diproses menjadi undang-undang yang dibutuhkan masyarakat luas.

"Diperlukan strategi dan upaya yang terukur dari para

legislator agar mampu meningkatkan kinerja dalam menjalankan fungsinya sebagai pembuat undang-undang bersama pemerintah," tegas Rerie.

Di pihak DPR RI, anggota Komisi IV Luluk Nur Hamidah meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ikut terlibat dalam pembahasan RUU PPRT. "Diplomasi Internasional kita seharusnya menjadi lebih kuat manakala punya RUU yang memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga," tandas Luluk. (Ant/MGN/P-2)